IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FUNGSI MANAJEMEN

DI LPM PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA

Oleh:

Dra. Siti Fatimah, M.Pd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Tinjauan Pustaka 7

E. Kerangka Teori 10

1. Tinjauan Kebijakan ……

2. Tinjauan Implementasi Kebijakan……..

3. Tinjauan Fungsi Manajemen Perencanaan……..

4. Tinjauan Pondok Pesantren …….

F.Metode Penelitian 21

BAB II : DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN..... 48

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Wakhid Hasyim…….48

B. Gambaran Masyarakat Dakwah……...50

BAB III : HASIL PENELITIAN 60

BAB IV :PENUTUP.....97

1. Kesimpulan 94

2. Saran dan Kritik..... . 95

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACK

Problems that must be addressed by dakwah institutions are problems related to da'wah, including values, needs or opportunities that are not realized. Da'wah is a public need, especially Muslims, so it is included in the category of public policy. The characteristics of public problems that must be resolved are not only interdependent, but also dynamic in nature, so solving the problem requires a holistic approach, namely an approach that views problems as an activity of a whole that cannot be separated or measured separately from other factors. For this reason, a public policy is needed as an instrument to achieve goals. Public policy in this case is a policy that is intended for the object of da'wah or the wider community of preaching.

In connection with the context of achieving the goals of the Wakhid Hasyim Islamic boarding school dakwah institution, related to institutional planning management, the implementation of policies is absolutely necessary. At the level of implementation of da'wah planning policies it is relatively easy to do because the target group is relatively homogeneous, namely Islamic community groups that have become objects or targets of da'wah, there is a good emotional bond with the institution. However, some of the planned policy agendas could not be implemented due to the pandemic that was currently hitting.

Key words: implementation, policy and management

ABSTRACK

Masalah yang harus diatasi oleh lembaga dakwah adalah masalah yang berkaitan dengan dakwah diantaranya nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Dakwah merupakan kebutuhan masyarakat banyak terutama umat islam, maka didalamnya termasuk kategori kebijakan publik. Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi berketergantungan juga bersifat dinamis sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari faktor lainnya. Untuk itu diperlukan kebijakan yang sifatnya publik sebagai instrumen pencapaian tujuan. Kebijakan publik dalam hal ini adalah kebijakan yang diperuntukan kepada obyek dakwah atau masyarakat dakwah yang lebih luas.

Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan lembaga dakwah Pondok Pesantren Wakhid Hasyim, terkait dengan manajemen perencanaan lembaga, maka implementasi kebijakan mutlak untuk diimplementasikan. Pada tataran implementasi kebijakan perencanaan dakwah relatif lebih mudah dilakukan dikarenakan kelompok sasaran yang relatif bersifat homogen, yaitu kelompok masyarakat islam yang sudah menjadi obyek atau sasaran dakwah ,terdapat ikatan emosional yang baik dengan pihak lembaga. Namun demikian beberapa agenda kebijakan yang telah direncanakan sebagian belum bisa dilaksanakan karena faktor pandemi yang sedang melanda.

Kata kunci : Implementasi, kebijakan dan Manajemen

BAB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah yang harus diatasi oleh lembaga dakwah adalah masalah yang berkaitan dengan dakwah diantaranya nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut bisa diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik, dakwah merupakan kebutuhan masyarakat banyak terutama umat islam, maka didalamnya termasuk kebijakan publik. Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi berketergantungan juga bersifat dinamis sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari faktor lainnya. Untuk itu diperlukan kebijakan yang sifatnya publik sebagai instrumen pencapaian tujuan. Kebijakan publik dalam hal ini adalah kebijakan yang diperuntukan kepada obyek dakwah atau masyarakat dakwah yang lebih luas.

Pakar yang lebih awal mencurahkan perhatian dan gagasan terhadap masalah implementasi ialah Douglas R. Bunker di depan forum *The American Association For The Advancementof Science* pada tahun 1970.[1]

---

[1]Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif , Model dan kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca Vol 1 Agustus 2008 Univesitas Pepabari Makassar

Konsep implementasi kebijakan semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari tahap proses kebijakan. Wahab (1991: 117) dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahab yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Bahwa tanpa implementasi kebijakan yang efektif tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupkan aktifits yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang syah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Fungsi manajemen adalah merupakan sebuah aktivitas yang selalu ada dalam organisasi, terdapat beberapa pendapat tentang fungsi tersebut hanya pendekatan yang dilakukan tidak sama. Dalam teori manajemen fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Pada umumnya ada empat (4) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan *(planning)*, fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pengarahan (*directing)* dan fungsi pengendalian *(controlling)*. Untuk fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi staffing (pembentukan staf). Para manajer dalam organisasi perusahaan atau nirlaba diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal.

adapun fungsi-fungsi manajemen adalah;

1. *Planning*: Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.

2. *Organizing*: Fungsi perngorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.

3. *Directing:* Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya

4. *Controling*: Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.

Dalam ilmu menejemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah perencanaan, dimana dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan.

Definisi perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-

strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni :[2]

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternative yang dipilih.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

[2] Suandy, Erly, 2003, Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta

Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam setiap jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan dimasyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pesantren adalah salah satu lembaga yang dapat membantu terbentuknya karakter seseorang, pesantren juga merupakan lembaga tertua yang melekat dalam perjalanan kehidupan manusia, ia dipandang sebagai lembaga ritual, dan lembaga pembinaan moral. Pondok pesantren bisa menjadi *"social agent"* yang tepat untuk membantu pemerintah dalam perbaikan sector ekonomi, budaya dan social masyarakat, tapi dengan satu syarat bahwa secara organisasional pondok pesantren harus mau untuk berubah, baik secara kultur, cara pendekatan dan aspek-aspek manajemen.[3]

Pondok pesantren Wahid Hasyim adalah salah satu pesantren yang berada di Yogyakarta, lebih tepatnya berada di jalan Wahid Hasyim no 03 Gaten Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta. Secara geografis, pondok Pesantren Wahid Hasyim beradaa pada lokasi yang sangat strategis, mudah terjangkau oleh transportasi umum, berdekatan dengan pusat-pusat penddikan perguruan tinggi (UIN Sunan Kalijaga, UNY, UGM, UPN, AMIKOM, STIE YKPN) serta pusat kebudayaan seperti (perpustakaan Bung Hatta, Museum Affandi, Museum Udara

[3] Rohadi, dkk, Rekonstruksi Pesantren Masa Depan (Jakarta: PT. Listarafiska Putra, 2008)

Adi Sucipto, Museum Benteng Vredeburg, Monumen Jogja Kembali, Candi Prambanan dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat) dan berdekatan dengan pusat-pusat pemerintahan.[4]

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga Islami yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Wahid Hasyim bergerak dalam bidang pengabdian pada masyarakat terutama yang menyangkut keagamaan. Awal berdirinya LPM tidak lepas dari berdirinya Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Sebab sejak awal aktifitas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat merupakan komitmen Pondok Pesantren Wahid Hasyim sebagai lembaga keagamaan.

LPM PPWH merupakan salah satu bentuk dakwah yang dilakukan terhadap masyarakat sekitar pondok pesantren. Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, makacitra professional dalam dakwah akan terwujud dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian dakwah tidak hanya dipakai dalam obyek ubudiyah saja, akan tetapi diinterpretasikan dalam beberapa profesi. Inilah yang dijadikan inti dari pengaturan secara manajerial organisasi dakwah. Aktivitas dakwah dikatakan berjalan secara efektif apabila apa yang menjadi tujuannya benar-benar tercapai, dan dalam pencapaiannya membutuhkan pengorbanan-pengorbanan yang wajar.[5]

Kebijakan dakwah yang direkomendasikan kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan di masyarakat tersebut. Untuk mengetahui keefektifan kebijakan tentang manajemen

---

[4] Dikutip dari profil dan dokumen LPM PPWH
[5] Muhtarom, Zaini. 1996. Dasar-dasar Manajemen Dakwah, PT. al- Amin Press, Yogyakarta

perencanaan dakwah, maka kebijakan dakwah tersebut harus diterapkan dalam masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasi kebijakan dakwah yang diterapkan pada lembaga PondokPesantren Wakhid Hasyim ? sebagaimana diketahui bahwa implementasi sebuah kebijakan itu membutuhkan dukungan dari lembaga dan semua unsur yang terkait dengan aktifitas program dakwah tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk mengarahkan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, perumusan masalah harus di lakukan berdasakan latar belakang. Adapun yang menjadi rumusan masalah terkait dengan penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Kebijakan Fungsi Manajemen perencanaan di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang mendasari penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut adalah:

Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk implementasi kebijakan fungsi manajemen perencanaan di Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LPM PPWH)

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis diharapkan akan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap para pengelola LPM PPWH, khususnya dalam rangka pembuatan kebijakan dakwah dan implementasinya terkait dengan penataan manajemen perencanaan dan pengembangan aktivitas dakwah di desa binaan
2. Secara teoritis diharapkan mampu untuk menghasilkan pemikiran baru terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan pondok pesantren

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan fungsi manajemen di Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, khususnya di bidang perencanaan terhadap aktivitas pembinaan masyarakat di sekitar PPWH. Oleh karena itu penulis menyimpulkan ada beberapa karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini antara lain:

1. Kebijakan dakwah Radio Retjo Buntung dalam Program Lentera Rohani dan Beranda (2009) oleh Mariyah menyimpulkan bahwa sikap kebijaksanaan yang dimiliki oleh subyek dakwah sangat diperlukan guna menghindari permasalahan dan perpecahan dikalangan umat.
2. Jurnal Administrasi Publik, Implementasi Kebijakan , Haedar Akib (2010), menyimpulkan bahwa implemetasi kebijakan beradasarkan

pengetahuan meneknkan peranan dan fungsi aktor, pelaksana, pemangku kepentingan dan kelompok target dalam memberdayakan kreasi pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan atau program.[6]

3. Penelitian tesis yang ditulis Sahrizal Fahlawi, S.Pd.I, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Kontribusi Kompetensi Guru Pondok Pesantren Wahid Hasyim Dalam Pembentukan Religiusitas Masyarakat Daerah Binaan Desa Condong Catur Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang identifikasi jenis kompetensi guru yang berpengarus terhadap sikap religious warga binaan dan model pendekatan yang dpat mempengaruhi sikap religious warga binaan.[7]
4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Ibnu Rosidi: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: Pengembangan SDM Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Dalam penelitian ini menjelaskan bentuk pengembangan SDM yang dilakukan LPM PPWH terhadap pembentukan karakter santri. Bentuk-bentuk pengembangan meliputi: Santri di beri amanah atau tanggung jawab untuk mengajar TPA, santri diberi amanah atau tanggung jawab

[6] Haedar Akib dalam Jurnal Administrasi Publik, Implementasi Kebijakan, Volume 1 No. 1 Th. 2010.
[7] Sahrizal Fahlawi, S.Pd.I, "Kontribusi Kompetensi Guru Pondok Pesantren Wahid Hasyim Dalam Pembentukan Religiusitas Masyarakat Daerah Binaan Desa Condong Catur Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", (Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

untuk mengisi materi kajian remaja, santri diberi amanah atau tanggung jawab untuk mengisi pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, santri diberi amanah atau tanggung jawab menjadi khotib jum'at dan santri diberi amana dan tanggung jawab untuk menjadi panitia dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan LPM PPWH seperti panitia dalam memperingati hari besar Islam

Lebih lanjut juga dijelaskan tentang empat nilai-nilai karakter yang terbentuk oleh santri dari implikasi pengembangan SDM LPM yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.Nilai-nilai karakter yang terbentuk ialah religious, disiplin, kreatif dan tanggung jawab. Empat nilai-nilai karakter tersebut telah ada dalam diri santri, yang terbentuk melalui proses perwujudan karakter yang telah berlangsung[8]

5. Skripsi yang ditulis Muhammad Maskur mahasiswa jurusan KI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2004 dengan judul *"Pengembangan Model Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren dalam peningkatan kualitas SDM di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Muhdlor desa Darunagan, Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur".* Skripsi ini berkesimpulan bahwa pengembangan model lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Muhdlor desa Darunagan, Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur adalah model pondok pesantren khalafiyah (modern). Dalam rangka pengembanganya dilakukan dengan dua aspek yaitu

[8] Ibnu Rosidi, " Pengembangan SDM Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Lembaga Pengabdian Pda Masyarakat (LPM) Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta", (Skripsi Sarjana Strata I Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

aspek non fisik (pendidikan agama, pengajian kitab, pendidikan dakwah dan pendidikan formal) dan aspek fisik (Asrama, pondok, rumah kyai,mushala).[9]

6. Penelitian yang dilakukan Mariana Harianja Program Studi Manajemen Universitas Terbuka, dalam jurnal ekonomi dan manajemen yang berjudul: Fungsi Manajemen Dalam Organisasi. Masalah yang diteliti berkaitan dengan penelitian ini adalah pengertian organisasi, pengertian makna manajemen, fungsi manajemen dalam perusahaan, prinsip manajemen, peranan manajemen dan tujuan manajemen dalam perusahaan. Metode yang digunakan ialah penelitian deskriptif yang semata-mata berdasarkan fakta yang ada atau fenomena empiris yang berkembang dalam dunia perusahaan pada saat ini.[10]

F. LANDASAN TEORI

Secara umum Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan.Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Suatu kebijakan itu bisa berbentuk sebuah program atau kegiatan

[9]Muhammad Maskur, *"Pengembangan Model Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren dalam peningkatan kualitas SDM di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Muhdlor desa Darunagan, Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur",*(Skripsi Sarjana Strata 1 Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012).

[10] Jurnal Ekonomi dan Manajemen Program SI Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

yang menjadi keputusan pihak yang mempunyai kewenangan sebagaimana yang terjadi pada LPM pondok Pondok Pesantren Wakhid Hasyim Yogyakarta.

1. Tinjauan Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada pada suatu Negara. Kenyataannya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan orang banyak termasuk dalam hal ini adalah permasalahan dakwah akan terkait dengan kebijakan publik sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan dan mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Maka dalam mengupas permasalahan peneliti ini , menggunakan landasan kebijakan publik.

Pengertian dari kebijakan dikemukakan oleh Anderson (Wahab 2005) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut [11]:

a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit

g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu

h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

[11] Sholihin Abdul Wahab (2008), Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke implementasi Kebijakan Negara, hal. 40-50

i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah

j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasanalasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d) Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain munkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini; Tahap-Tahap Kebijakan: Penyusunan kebijakan Formulasi kebijakan Adopsi kebijakan Implemantasi kebijakan Evaluasi kebijakan Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para adsministrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikutn :

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. b) Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birikratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya,orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

a) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.

b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.

d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh

tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010: 31).

5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

6. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods) Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Sholichin Abdul Wahab sebagaimana

dikutip Suharno (2010: 25- 27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu: a. Tuntutan kebijakan (policy demands) Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (policy decisions) Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusankeputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (policy statements) Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradialn, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (policy outputs) Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes) Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau

tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

William N. Dunn membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian,[12] yaitu: a. Masalah kebijakan (policy public) Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b. Alternative kebijakan (policy alternatives) Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c. Tindakan kebijakan (policy actions) Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d. Hasil kebijakan (policy outcomes) Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

e. Hasil guna kebijakan Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberiakn sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataanya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan

[12] Dunn, William N, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey , hal 21

kembali atau perumusan kembali. Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi:

1) kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri);

2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen);

3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).

Tinjauan Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle sebagaimana yang dikutip oleh Haedar Akib dalam jurnalnya Implementasi Kebijakan, Apa, Mengapa dan Bagaimana, mengatakan bahwa implementasi merupkan proses umum tindakan administratif yang dapt diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan, dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai sasaran.[13] Jika pemahaman ini diarahkan pada perubahan dimna kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wibawa dkk (199: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah atau swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untukmencapai tujuan.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang

[13] Haedar Akib, Implementasi Kebijakan dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 th 2010

menurut Djadja Saefullah bahwa studi kebijakan public tersebut dapat dipahami dari dua perspektif yakni:Pertama, perspektif politik bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepetangan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi,harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.Kedua, perspektif adminitratif bahwa kebijakan publik merupakan ihwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkankebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang di inginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipillih oleh policy makers, bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran sebagaimana dikutip oleh AG Subarsono dalam Analisis Kebijakan Publik, oleh Lipsky disebut dengan " *Street Level Bureaucrat* " [14] Untuk kebijakan yang sederhana , implementasi hanya meliatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementator.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Diantaranya menurut pandangan sebagai berikut : [15]

1. Teori Implementasi Kebijakan

[14] AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pen, Pustaka Pelajar, hal. 88
[15] Ibid, hal.90

a. Teori George C.Edwards III (2004)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1)komunikasi (2) sumberdaya (3)disposisi dan (4) struktur birokrasi.
Keempat variabel tersebut juga salingn berhubungan satu sama lain.

b. Teori Merilee S. Grindle keberhasilan

implementasi menurut Merilee S. Grindle (Wibawa (2005) yangmenjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan
(konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana.
Variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:
1. Kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
6. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan disbanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat,

kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Tinjauan Tentang Pondok Pesantren

1. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Kata Pondok berarti ruang tidur, pemondokan, hotel atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya.[16]Sedangkan dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti madrasah tempat belajar agama Islam.

Kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe- dan akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata sant (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.Sedangkan menurut Geertz pengertian pesantren diturunkan dari bahasa India Shastri yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis, maksudnya pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Dia menganggap bahwa pesantren dimodifikasi dari para Hindu.[17]

[16] MU YAPPI,"*Manajemen pengembangan pondok pesantren"*, (Jakarta: Media Nusantara,2008), hal.23.
[17] Wahjoetomo, "*Perguruan Tinggi Pesantren"*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Jadi pengertian pondok pesantren bisa dipahami sebagai tempat atau pemondokan para santri membina ilmu pengetahuan agama dan mengamalkan dalam bentuk ritual kegiatan sehari-hari.

b. Sejarah pondok pesantren

Pondok pesantren bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pondok pesantren sudah dikenal jauh sebelum indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya.[18]

Berdirinya pondok pesantren tidak terlepas dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia bermula ketika orang-orang yang masuk Islam ingin mengetahui lebih banyak isi ajaran agama yang dianutnya, baik mengenai tata cara ibadah, membaca al quran dan pengetahuan Islam lebih mendalam dan luas. Mereka ini belajar di rumah, masjid, surau atau langgar. Di tempat-tempat inilah orang-orang yang baru masuk Islam dan anak-anak mereka mendalami Islam secara individu dan langsung. Dalam perkembangannya, keinginan untuk lebih memperdalam ilmu-ilmu agama telah mendorong tumbuhnya pesantren yang merupakan tempat untuk melanjutkan belajar agama setelah tamat belajar di surau, langgar dan masjid. Model pendidikan pesantren ini berkembang di seluruh Indonesia, dengan nama dan corak yang beragam.

c. Tujuan Pendidikan Pesantren

[18]Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *"Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembanganya", (*Jakarta : Departemen Agama, 2003), hal. 1.

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Oleh karena itu, sejak awal pertumbuhannya. Tujuan utama pengembangan pendidikan di pondok pesantren adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam yang diharapkn dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia yang kemudian diikuti dengan tugas dakwah. Dakwah untuk menyebarkan agama Islam

Tujuan pendidikan pesantren ialah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat di tengah-tengah masyarakat (*Izz al-Islam wa al-Muslimin*) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia.[19]

d. Unsur-unsur pesantren

Suatu lembaga pendidikan Islam dapat disebut sebagai pondok pesantren apabila telah memenuhi lima unsure, yaitu kiai (Jawa) atau tuan guru (Lombok), santri, pengajian (pengajaran kitab-kitab Islam klasik), asrama, dan masjid dengan segala aktivitas pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan. Berikut uraiannya:

1). Kiai

[19]Mujamil Qomar, *"Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Istuti"*, (Jakarta : Erlangga),hal. 4.

Kiai adalah pendiri pondok pesantren. Eksistensi dari pondok pesantren sangat bergantung pada kualitas yang dimiliki kiai karena merupakan figur sentral yang menjalankan roda pemerintahan di pondok pesantren. Kata-katanya bagaikan undang-undang yang harus dipatuhi segenap pengikut penatiknya. Tanpa kiai hampir dipastikan roda pemerintahan di sebuah pondok pesantren akan mengalami stagnasi dalam perjalanannya.

2) Santri

Santri adalah siswa yang belajar di pondok pesantren. Jumlah santri menggambarkan kualitas yang dimiliki kiai. Pada pondok pesantren tempo dulu semakin banyak santri yang belajar di sebuah pondok pesantren menandakan eksistensi kiai sangat diakui oleh masyarakat sehingga masyarakat akan mempercayakan anak-anak mereka untuk belajar di pondok pesantren yang diasuh kiai tersebut. Semakin banyak santri maka semakin banyak orang yang akan mengakui kualitas yang dimiliki kiai.

3) Asrama

Asrama adalah tempat tinggal santri yang belajar di pondok pesantren. Asrama merupakan simbol kesederhanaan dan kebersamaan karena satu kamar atau ruangan diisi oleh puluhan bahkan ratusan santri yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Semua santri mendapat perlkuan yang sama dalam hal ini. Asrama merupakan kelebihan dari pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan selainnya.

4) Masjid

Masjid merupakan tempat berlangsungya aktivitas pendidikan diluar pendidikan formal yang diadakan di pondok pesantren. Aktivitas pendidikan itu meliputi , pengajian kitab kuning, menghafal al quran, dan lain-lain. Selain itu masjid juga dijadikan pusat pelaksanaan ibadah-ibadah ritual seperti sholat berjamaah yang biasanya di wajibkan bagi semua santri.

Dari unsur-unsur tersebut, Kyai adalah unsur penentu dan tokoh kunci yang menentukn corak kehidupan pesantren. Kyai merupakan panutan para santri dan masyarakat sekitar, sehingga menumbuhkan sikap "paternalistik" yang sangat kental.[20]

Tinjauan Fungsi Manajemen Perencanaan

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[21]Dalam ilmu menejemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah perencanaan, dimana dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas organisasi sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan.

---

[20] Badri, Munawiroh."*Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah*", (Jakarta : Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI, 2007), hal. 37.

[21] Malayu S..P.Hasibuan,2009, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, Bumi Aksara, Bandung

Fungsi perencanaan adalah fungsi yang terpenting dalam manajemen, oleh karena akan menentukan fungsi-fungsi manajemen berikutnya, dan merupakan landasan pokok dari semua fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, fungsi-fungsi manajemen lainnya pun sukar untuk dijalankan. Perencanaan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap segala pekerjaan yang harus dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan landasan pokok bagi pelaksaan fungsi-fungsi manajemen lainnya Perencanaan, dapat memberikan tuntunan bagi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan menjadi lebih efisien dan efektif, karena perencanaan meliputi keputusan tentang waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bila akanaa dilakukan, dan siapa yang akan melakukan. Sekalipun waktu yang akan datang jarang dapat di perkirakan secara tepat, terutaman factor-faktor diluar jangnkauan para manajer, tetapi dengan proses intelektual, perencanaan diharapkan akan dapat mendekati kenyataan/kebenaran. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa keputusan harus berdasarkan tujuan organisasi, pengetahuan dan perkiraan yang diperhitungkan. Jelasnya perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dalam waktu yang akan datang, dengan usaha/cara yang seefisien dan seefektif mungkin.untuk mencapainya. Oleh karena itu, perencanaan adalah suatu keputusan tentang apa yang akan diharapkan didalam waktu yang akan datang.

Definisi perencanaan dikemukakan oleh Erly Suandy sebagai berikut: Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan

organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.[22]

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan dating guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.[23]

. Syarat, Sifat, Tujuan, Manfaat, Elemen, Kelemahan serta Alasan -Alasan perlunya perencanaan

a. Perencanaan yang dibuat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Faktual dan realistik
2. Logis dan rasional
3. Fleksibel
4. Kontinuitas
5. Dialektis[24]

b. Sifat-sifat dari perencanaan adalah:[25]

1. Kontribusi terhadap tujuan *(contribution of onjective)*

---

[22] Suandy, Erly, 2003, Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
[23] Usman, Husaini,2011. Manajemen"Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan. Jakarta"PT Bumi Aksara
[24] Sri Wiludjeng. *Pengantar Manajemen (*Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2007).

[25] *ibid*

Yaitu perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan.

2. Kedudukan yang istemewa dari suatu perencanaan *(primacy of planning)*

   Bahwa setiap perencanaan selalu mendapat tempat yang pertama dalam suatu proses manajemen dan perencanaan harus mampu memberikan arah terhadap proses manajemen selanjutnya.

3. Kemampuan pengisian dari *planning (pervasiveness of planning)*

   Yaitu perencanaan merupakan dasar manajemen yang berisi tujuan dan cara pencapaiannya.

4. Efisiensi dari perencanaan *(effeciency of planning)*

   Rencana yang telah direncanakan dapat tercapai dengan cara yang efisien.

c. Tujuan Perencanaan[26]

Tujuan dari perencanaan adalah:

1. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya
2. Mengetahiu kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan
3. Mengetahiu siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasinya maupun kuantitasnya
4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan

[26] Usman. *Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

5. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu
6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan
7. Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan
8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, dan
9. Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

d. Manfaat Perencanaan[27]

Perencanaan mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan
2. Membantu dalam kristalisasi persesuaian dalam masalah-masalah utama
3. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas
4. Pemilihan berbagai alternatif terbaik
5. Standar pelaksanaan dan pengawasan
6. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan
7. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi
8. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
9. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipaham

[27] Usman. *Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

10. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, dan
11. Menghemat waktu, usaha dan dana.

e. Kelemahan Perencanaan[28]

Perencanaan juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya:

1. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata
2. Perencanaan cenderung menunda kegiatan
3. Perencanaan mungikn terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi
4. Perencanaan mempunyai nilai praktis yang terbatas.
5. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi; dan
6. Ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten.

Meskipun perencanaan mempunyai kelemahan-kelemahan tersebut, manfaat-manfaat yang didapat dari perencanaan jauh lebih banyak. Oleh karena itu perencanaan tidak hanya seharusnya dilakukan, tetapi harus dilakukan.

f. Elemen Perencanaan

Elemen perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana itu sendiri (*plan*).

1. Sasaran

[28] T. Hani Handoko. *Manajemen (*Yogyakarta: BPFE, 1984).

Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi.[29]Sasaran sering pula disebut tujuan.Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.

Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan (*stated goals*) dan sasaran riil. Stated goals adalah sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas. Sasaran seperti ini dapat dilihat di piagam perusahaan, laporan tahunan, pengumuman humas, atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. Seringkali *stated goals* ini bertentangan dengan kenyataan yang ada dan dibuat hanya untuk memenuhi tuntutan *stakeholder* perusahaan. Sedangkan sasaran riil adalah sasaran yang benar-benar dinginkan oleh perusahaan. Sasaran riil hanya dapat diketahui dari tindakan-tindakan organisasi beserta anggotanya.

Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan organisasi untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, manajer puncak memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa manajer puncak adalah orang yang tahu segalanya karena mereka telah melihat

[29]F. Delmar dan S. Shane, "Does Business Planning Facilitate the Development of New Ventures" *Strategic Management Journal*, December 2003, pp. 1165—1185.

gambaran besar perusahaan. Kesulitan utama terjadi pada proses penerjemahan sasaran atasan oleh bawahan. Seringkali, atasan memberikan sasaran yang cakupannya terlalu luas seperti "tingkatkan kinerja," "naikkan profit," atau "kembangkan perusahaan," sehingga bawahan kesulitan menerjemahkan sasaran ini dan akhirnya salah mengintepretasi maksud sasaran itu

2. Rencana

Rencana atau *plan* adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya.Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.Berdasarkan cakupannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana strategis dan rencana operasional.Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku diseluruh lapisan organisasi sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi.

g. Aktivitas dalam perencanaan antara lain:

1. *Forecasting* (perkiraan) sebagai usaha yang sitematis untuk meramalkan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui. Mengestimasi dan memprediksi kondisi dan kejadian di masa dating serta kebutuhan dan peluang yang menyertainya. Dari pernyataan dan penjelasan ini dapat di jadikan

kesimpulan pertatanyaan: Seperti apa rupanya masa depan itu? Tantangan dalam melakukan prakiraan atau ramalan masa depan adalah karakteristik perubahan.

2. *Establishing objective* (penetapan tujuan) merupakan aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan
3. *Programming* (pemrogaman) yaitu aktivitas yang dilakukan dengan maksud menetapkan langkah-langkah mencapai tujuan, unit dan anggota yang bertanggung jawab serta urutan pengaturan waktu setiap langkah.[30]
4. *Scheduling* (penjadwalan) merupakan penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan
5. *Budgeting* (penganggaran) yaitu aktivitas membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk kegiatan dan waktu tertentu
6. *Developing procedure* (pengembangan prosedur) prosedur yaitu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan
7. *Estambling and interpreting police* (penetapan dan interpretasi kebijakan) yaitu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi pekerjaan manajer dan bawahannya.[31]

---

[30] Terry, George.R. 2006. Prinsip-prinsip Manajemen. Penerjemah Smith. Jakarta: PT Bumi Aksara

[31]Siswanto.2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.[32]

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Pada penelitian ini akan mengetahui bagaimana penerapan kebijakan dakwah tentang fungsi manajemen perencanaan di LPM PPWH, dimana peneliti akan mengetahui dan menganalisa mendalam bagaimana gambaran penerapan kebijakan dari perencanaan yang dilaksanakan di LPM PPWH dalam kegiatan pembinaan maasyarakat sekitar pondok pesantren.

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta khususnya pada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat. Dasar pertimbangan penelitian adalah LPM PPWH merupakan pondok pesantren

[32] Suandy, Erly, 2003, Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.

yang telah memiliki enam belas desa binaan dan secara geografis berada berdekatan dengan pusat-pusat pendidikan perguruan tinggi serta pusat-pusat kebudayaan seperti (perpustakaan Bung Hatta, Museum Affandi, Museum Udara Adi Sucipto, Museum Benteng Vredeburg, Monumen Jogja Kembali, Candi Prambanan dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat) dan berdekatan dengan pusat-pusat pemerintahan.

Sebagai subyek dari penelitian ini adalah semua unsur yang terlibat dalam kegiatan penerapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengabdian pada masyarakat. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah *purpose sampling*. Pertimbangan yang digunakan adalah bahwa informan tersebut dianggap paling tahu dan yang terlibat secara langsung sebagai pelaku dari aktivitas kegiatan perencanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adala snow ball sampling, yaitu teknik mengambil informan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak, karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, makamencari orang lai lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Sumber data utama (key person) dalam penelitian ini yang dianggap memenuhi karakteristik yang ditentukan, dengan pertimbangan yang digunakan adalah

bahwa informan tersebut dianggap paling tahu dan atau yang terlibat secara langsung sebagai pelaku dari aktivitas kegiatan pengabdia masyarakat.[33]

Metode pengumpulan data dalam penelitian in menggunakan teknik wawancara, *Focus Group Discusion* (FGD), observasi dan studi dokumentasi.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan 2 tahap. Tahap I peneliti melakukan wawancara dan observasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pengabdian pada masyarakat Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.Pda tahap II dilaksanakan setelah semua data wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi diperoleh.Pada tahap ini peneliti melaksanakan diskusi bersama denga ketua dan segenap jajaran di bawahnya yang bertujuan untuk mendiskripsikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penerapan kebijakan fungsi manajemen khususnya perencanaan di dalam LPM PPWH.

Berdasarkan fokus penelitian dan peran peneliti sebagai bagian dari pelaksana proses pengabdian masyarakat di LPM PPWH maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, Script Fokus Group Discussion, pedoman observasi dan peneliti sendiri yang melakukan wawancara.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, criteria yang digunakan meliputi: kredibilitas, transferabilitas, dependenabilitas, dan konfirmabilitas.

---

[33] Abdurahman, Dudung, Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Yogyakarta: IFFA Press, 1998

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa model interaktif.Analisa interaktif dilakukan melalui reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi.

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Wahid Hasyim

Pondok pesantren Wahid Hasyim adalah salah satu pesantren yang berada di Yogyakarta. Lebih tepatnya berada di jalan Wahid Hasyim No.03 Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Secara geografis, pondok Pesantren Wahid Hasyim berada pada lokasi yang sangat strategis, mudah terjangkau oleh transportasi umum, berdekatan dengan pusat-pusat pendidikan perguruan tinggi (UIN Sunan Kalijaga,UNY, UGM, UPN, AMIKOM, STIE YKPN) serta pusat-pusat kebudayaan seperti (Perpustakaan Bung Hatta, Museum Affandi, Museum Udara Adi Sucipto, Museum Benteng Vredeburg, Monumen Jogja Kembali, Candi Prambanan dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat) dan berdekatan dengan pusat-pusat pemerintahan.

Adapun pondok Pesantren Wahid Hasyim itu sendiri secara administrasi pemerintahan terletak di jalan KH Wahid Hasyim No 3 RT.06/ RW.28 Gaten, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.[34]

Adapun batas-batas LPM PPWH adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Pedukuhan Pringwulung
2. Sebelah Utara : Selokan Mataram
3. Sebelah Timur : Jalan KH.Wahid Hasyim
4. Sebelah Selatan : Pedukuhan Nologaten. [35]

[34] Hasil observasi 2020

4. Gambaran Umum Masyarakat Binaan

1. Letak geografis

Secara umum seluruh wilayah binaan LPM PPWH masuk dalam kawasan desa Condong Catur, yakni salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum tahun 1946, wilayah Desa Condongcatur yang sekarang ini ada, pada mulanya merupakan wilayah dari 4 (empat) kelurahan, masing-masing adalah: Kelurahan Manukan, Kelurahan Gejayan, Kelurahan Gorongan, Kelurahan Kentungan.

Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintah Kelurahan, maka 4 (empat) kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi 1 (satu) "Kelurahan yang otonom" dengan nama Desa Condongcatur yang secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat nomor: 5 Tahun 1948 tentang perubahan Daerah-daerah Kelurahan, Desa Condongcatur berdiri atau diresmikan pada tanggal 26 Desember 1946. Sampai saat ini perkembangan Desa Condongcatur meliputi 18 Pedukuhan yang terdiri 64 RW dan 207 RT

Secara geografis Desa Condongcatur sangat strategis karena dilalui jalan alteri (Ring Road Utara) yang sekaligus merupakan prasarana

[35] Dikutip dari profil dan dukumen LPM PPWH

transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian warga Desa Condongcatur khususnya dan Kabupaten Sleman pada umumnya. Keberadaan Desa Condongcatur di wilayah ini berdampak pada perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi dan kependudukan. Adapun mengenai luas wilayah, Desa Condongcatur memiliki luas wilayah seluas 950.000 Ha. Artinya dengan luas wilayah seperti itu dan didukung oleh letak yang strategis Desa Condongcatur sangat berpotensi menjadi desa yang maju seperti desa-desa lain yang terlebih dahulu maju.

Desa Condongcatur ini mempunyai luas wilayah 950 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Minomartani (Ngaglik)
b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Catur Tunggal (Depok)
c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sinduadi (Mlati)
d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Maguwoharjo (Depok)

Desa Condong catur ini terbagi menjadi 19 dusun dimana dari 12 dusun adalah masuk dalam wilayah binaan tetap LPM PPWH. Adapun jarak desa Condong catur dari pusat pemerintahan yaitu:

a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 2 km
b. Jarak dari ibu kota kabupaten/kota madya : 8 km
c. Jarak dari ibu kota propinsi dati I : 8 km

2. Sosial keagamaan

Keadaan social keagamaan di desa condongcatur sebelum adanya program kegiatan yang di adakan LPM Pondok Pesantren Wahid Hasyim kondisi keagamaannya masih sangat memprihatinkan artinya masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami agama islam secara baik, baik dalam hal membaca alquran, pemahaman agama. Maupun dalam melaksanakan ajaran agama Islam, karena memang pada saat itu di desa Condong catur belum ada organisasi keagamaan yang membina dan mengajari masyarakat tentang Islam. Artinya saat itu belum ada orang atau tokok yang dapat mengarahkan, membimbing, dan mengajari masyarakat tentang agama. Hal inilah yang kemudian menyebabkan sebagian masyarakat Condongcatur mengalami kemerososstan dalam menjalankan spiritualitas keagamaan. Keadaan ini masih terus berlanjut sampai berdirinya pondok pesantren wahid hasyim. Melihat dari kondisi yang seperti itu kemudian dibentuklah suatu lembaga yang khusus bergerak dibidang social keagamaan yang diberi nama “Lembaga Pengabdian Masyarakat PPWH”

Keadaan keagamaan di desa Condongcatursetelah adanya program kegiatan keagamaan yang dikembangkan oleh LPM PPWH perlahan mulai membaik dan kini semua kegiatan yang berkaitan dengan social keagamaan sudah mulai teroganisir dengan baik. Secara umum keadaan kegiatan keagamaan di desa Condonngcatur banyak

berbentuk pengajian, seperti pengajian di bulan puasa ramadhan, khutbah jumat, pengajian tahlilan dan yasinan, khataman, dan ada juga kegiatan keagamaan yang bersifat tahunan seperti isro' mi;roj, mauled nabi, pengumpulan zakat fitrah, pemotongan hewan kurban dan lain-lain.[36]

Sampai saat ini kiprah LPM ditengah masyarakat menyentuh di berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja dan orang tua. Hal ini sudah terjalin jauh sebelum lembaga ini di formalkan. Artinya ruh perjuangan untuk memajukan masyarakat sudah ada semenjak dahulu. Dan kini LPM PPWH sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan masyarakat.

5. Sejarah Berdirinya dan Berkembangnya LPM Pondok pesantren Wahid Hasyim

LPM Merupakan salah satu lembaga Islami yang ada di pondok pesantren Wahid Hasyim bergerak dalam bidang pengabdian pada masyarakat terutama yang menyangkut keagamaan. LPM untuk kalangan Agamis, Mubaligh, Kyai dan Ulama sudah tidak asing lagi, karena LPM adalah satu-satunya lembaga dakwah profesional yang tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan saja, tetapi dengan kemampuan administrasinya LPM mampu bergerak melayani bidang pendidikan, sosial keagamaan.

[36] Hasil pemaparan Bpk Kyai Sunhaji, S.Ag selaku dari dewan Penasehat LPM PPWH

Awal berdirinya LPM ponpes Wahid Hasyim tidak terlepas dengan berdirinya pondok pesantren Wahid Hasyim. Sebab sejak awal aktifitas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat merupakan komitmen pondok pesantren Wahid Hasyim sebagai lembaga keagamaan.

Dalam catatan sejarah ponpes Wahid Hasyim tertulis bahwa pada tahun 1925, dusun gaten kedatangan seorang mubaligh dari godean Yogyakarta yang bernama K.H.Abdul Majid saat itu yang menjabat kepala dukuh gaten ialah Haryo Prawiro, kemudian oleh K.H Abdul Majid, Haryo Prawiro dibaiat menjadi penganut tarekat kholwatiyah dan sekaligus mengganti nama Haryo Prawiro menjadi Muhammad Syafe'i, selanjutnya K.H Abdul Majid punya insiatif membentuk sebuah forum pengajian yang dapat memberikan pengaetahuan dan pemahaman agama pada masyarakat Gaten, dari sinilah kemudian beliau memberikan forom pengajian tersebut dengan nama Majlis Ta'lim di dusun Gaten disebuah wilayah kota Yogyakarta.

Awal mula *Majlis Ta'lim* ini hanya sebuah kegiatan pengajian konvensional biasa yang diikuti oleh ibu-ibu dan beberapa orang dari kaum bapak. Namun demikian pada masa selanjutnya *Majlis Ta'lim* ini mengalami perkembangan *jama'ahnya*. Sehingga pelaksanaan yang pada awalnya dilakukan dirumah-rumah berganti dilaksanakan dimasjid Jami' Gaten secara rutinan.

Aktifitas ini terus berlanjut sampai pada akhirnya setelah K.H Abdul Majid wafat masyarakat pun secara langsung menunjuk seorang *sesepuh*[37] untuk menggantikan beliau. Tersebutlah nama Kyai Syafi'I yang dipercayai oleh masyarakat Gaten untuk menggantikan tugas dakwah beliau. Kyai Syafi'I yang saat itu menjabat sebagai kepala dukuh, dengan rasa penuh tanggung jawab berusaha terus untuk melestarikan keberadaan *Majlis Ta'lim* yang telah dirintis oleh Kyai Abdul Majid tersebut. Pada saat itu jumlah *Majlis Ta'lim* yang ada telah berkembang biak dibeberapa daerah sekitar dusun Gaten. Namun demikian perkembangannya yang cukup signifikan baru terjadi pada masa K. H Abdul Hadi Syafi'I. Yakni pengganti sekaligus juga putra sulung beliau sendiri.

K.H Abdul Hadi adalah alumnus pesantren Wonokromo, pimpinan Abdul Ghoni. Pada masa kecilnya, K.H Abdul Hadi menempuh pendidikan sekolah rakyat (SR) sampai kelas lima. Selanjutnya beliau diajak Harun, pembantu ayahnya untuk bersilaturahmi(mondok) ketempat-tempat kyai, seperti kyai Krapyak, Grobogan dan Dampaan, dari ilmu yang diperolehnya dari beberapa kyai, maka K.H Abdul Hadi berniat dan termotivasi untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan keagamaan.

Pada masa *Romo Kyai Haji* Abdul Hadi, keberadaan *Majlis Ta'lim* ini semakin mengalami perkembangan dari waktu kewaktunya. Tercatat lebih dari sepuluh *majlis ta'lim* yang sama telah mulai di-ada-kan di berbagai

[37] Sesepuh artinya orang yang dituakan atau dihormati dalam masyarakat

dusun disekitar wilayah Gaten. Bahkan saat itu, dengan didukung oleh Drs. Margono, H. Masyrif dan Bapak H. Kuat Hadikusumo, beliau juga mendirikan *Madrasah Diniyah* (1965) yang dikhususkan bagi remaja Gaten dan wilayah-wilayah sekitarnya. Demikian pada masa selanjutnya (1975) madrasah ini berubah menjadi *Madrasah Ibtadaiyah* dibawah naungan DEPAG RI dan mendapat bantuan tiga tenaga pengajar.

Perkembangan terjadi kembali pada tahun yang sama, dalam mana saat itu di dusun Nologaten terdapat PGA yang bernama Wahid Hasyim yang sedang mengalami krisis dan ingin bergabung dengan madrasah yang dikelolah oleh *Romo Kyai*[38]. Dan *Romo Kyai* sendirilah yang ditunjuk sebagai ketua pengelolahnya.[39] Karena melihat dari begitu banyaknya perkembangan dalam mengasuh lembaga pendidikan, maka tepat pada hari selasa Kliwon, tanggal 1 Maret 1977 Masehi atau 10 robiul awal 1393 Hijriah, beliau mendirikan pondok pesantren yang diberi nama denagan pondok pesantren Wahid Hasyim. Adapun alasan penamaan Wahid Hasyim karena K.H Abdul Hadi sangat terkesan dengan keilmuan atau pendidikan kyai Wahid Hasyim. Sebagaimana K.H Abdul Hadi mengatakan " saya tertarik memberi nama ini karena saya terkesan dan salut akan kepandaian kyai Wahid Hasyim dari Jombang".

Dibawah pengelolaan *Romo Kyai*, PGA ini tidak hanya dapat terselamatkan keberadaannya melainkan tetap terus Eksis hingga sampai pada tahun 1980-an. dimana waktu itu pemerintah mulai menerapkan

[38] Romo bisa diartikan bapak
[39] Dikutip dari Arsip Yayasan PPWH

kebijakan baru berkenaan dengan penghapusan PGA dan menggantinya dengan MTs maupun *Madrasah Aliyah*. Maka praktis, mulai saat itu PGA Wahid Hasyim berubah naman menjadi MTs Wahid Hasyim dan Madrasah Wahid Hasyim.

Perubahan ini tidak hanya membawa corak lain bagi kehidupan pendidikan di dusun Nologaten melainkan juga membawa nuansa baru didalamnya. Betapa semenjak mengalami perubahan institusi lembaga, madrasah tidak hanya semakin bertambah banyak peminatnya tapi juga bertambah "dewasa" pengelolaanya. Karenanya dapatlah dipahami bila secara fisik (material) madarasah ini juga mengalami pemekaran maupun perkembangan. Tercatat saat itu jumlah murid yang ada kurang lebih berjumlah 400 orang.

Namun demikian, ciri khas pengajian klasik yang telah dirintis oleh K Abdul Majid dan K. Syafi'i tetap dipertahankan oleh *Romo Kyai*. Bahkan demi untuk tetap melestarikan warisan luhur pendahulunya, yayasan ini, oleh Romo Kyai, dengan persetujuan beberapa pihak, dirubah menjadi *Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang bervisikan menciptakan lembaga yang dinamis-selektif, baik secara kulitatif maupun kualitatif, sehingga mampu melahirkan generasi Islam yang beriman, bertaqwa, cakap, trampil serta memiliki pemahaman yang komprehensif tentang Islam serta juga berdedikasi tinggi terhadap agama, bangsa dan negara.*

. K.H Abdul Hadi merupakan profil kyai yang bermasyarakat, beliau tidak hanya berkecimpung atau mengurusi pondoknya, akan tetapi juga sering melakukan aktivitas pengembangan agama (dakwah) diberbagai masjid yanga ada di wilayah Condongcatur. Kepedulian beliau terhadap masyarakat membuat beliau disegani masyarakat. Dalam melakukan kegiatan keagamaan (Dakwah) beliau juga melibatkan santrinya untuk berpartisipasi memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dan beliau juga melibatkan santrinya untuk berpartisipasi memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan beliau juga sangat menekankan santrinya untuk tidak hanya mengaji, akan tetapi juga mengabdikan diri pada masyarakat.

Dengan adanya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan K.H Abdul Hadi diluar pondok, atas gagasan Zainuri dan Muhammad Fatah(santri senior pada waktu itu), maka pada tanggal 27 mei 1987, didirikanlah sebuah lembaga yang kemudian dinamakan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LPM PPWH) guna untuk memberikan berbagai pelayanan kerohanian, masalah sosial keagamaan dan pendidikan diberbagai dusun didesa Condongcatur. LPM Ponpes Wahid Hasyim berkedudukan di pondok pesantren Wahid Hasyim, dusun Gaten, desa Condongcatur, kecamatan Depok, kabupaten Sleman Yogyakarta.[40]

Pada awal berdirinya LPM PPWH, masyarakat yang ada di wilayah LPM PPWH ini masah terbelakang dalam hal pengetahuan

[40] Diambil dari dokumen Akta LPM Ponpes Wahid Hasyim

keagamaan, artinya masyarakat belum begitu memahami dan mengetahui hukum syari'at agama Islam dengan baik dan benar.

Dengan adanya pendekatan-pendekatan yang berupa pembinaan-pembinaan yang dilakukan LPM PPWH, masyarakat mulai sadar akan pentingnya memahami syari'ah Islam. Melalui bimbingan dan pengarahan tentang Islam, masyarakat yang menjadi binaan LPM PPWH mulai menerapkan dan mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka yang telah didapat dari para da'i atau ustadz LPM Ponpes Wahid Hasyim.

Karena laju perkembangan yang sangat pesat, maka LPM pada periode ini telah memiliki empat belas daerah binaan tetap yang masing-masing mempunyai madrasah dengan nama Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) LPM PPWH. Ditambah dengan beberapa wilayah binaan yang titak tetap yang biasanya meminta pelayanan pada bidang hotib, penceramah, selamatan dan kegiatan-kegiatan lainya.

Setelah K.H Abdul Hadi wafat, maka yang melanjutkan perjuangan beliau adalah puteranya yang bernama K.H Jalal Suyuti sampai sekarang

6. Maksud dan Tujuan LPM PPWH

Berdirinya suatu lembaga pengabdian pada masyarakat sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kberadaan Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta itu sendiri. jalinan antara pondok dengan

masyarakat inilah menjadi cikal bakal berdirinya lembaga ini. Adapun awal tujuan didirikanya lemaga pengabdian pada masyarakat adalah:[41]

a. Untuk mengorganisisr aktivitas dakwah yang bersifat keluar yang dilakukan oleh yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim
b. Sebagai wadah pengabdian dan wahana intelektualitas santri
c. Berfungsi mengintegrasikan Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dengan masyarakat
d. Membantu pelaksanaan program-program Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dalam bidang pembinaan masyarakat

Berawal dari pemikiran itulah, kita dapat berfikir bahwa keberadaan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta sangatlah penting. Karena selain dapat digunakan sebagai wadah para santri untuk mengamalkan ilmu dan sarana pembelajaran menghadapi masyarakat. Dapat juga berfungsi untuk memecahkan problem sosial keagamaan yang sedang berkembang di masyarakat.

7. Azas LPM PPWH

Untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan, maka LPM PPWH berasaskan " Islam ahli sunnah wal jama'ah" yang artinya semua kegiatan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan aturan atau ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dan tidak boleh menyimpang dari ajaran-

[41] Arsip laporan pertanggung jawaban LPM PPWH

ajaran islam yang telah disyariatkan dalam al quran dan disunahkan oleh Rasulullah SAW.[42]

8. Sumber Dana LPM PPWH

LPM Wahid Hasyim dalam upaya merealisasikan setiap kegiatan yang telah direncanakan tentunya membutuhkan dana operasional. Adapun sumber dana atau keuangan diantaranya di dapat melalui:

a. Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim
b. Sumbangan donator tetap dari masjid binaan pada setiap tahunnya
c. Sumbangan dari sponsorship dengan cara menyebarkan proposal kerjasama pada perusahaan atau institusi terkait
d. Sumbangan donator yang halal serta tidak mengikat
e. Usaha-usaha penggalangan dana yang dilakukan oleh beberapa pengurus yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama

9. Wilayah Binaan LPM PPWH

Karena laju perkembangan yang sangat pesat, maka LPM PPWH telah memiliki lebih dari 20 wilayah binaan yang menyebar di desa Condong Catur. Diantaranya ada 14 desa binaan tetap yang masing-masing mempunyai madrasah dengan nama Taman Pendidikan Alquran (TPA) yang seluruh kegiatan di koordinasi secara terpusat di LPM PPWH.

[42] *ibid*

BAB III

ANALISIS DATA

A. HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FUNGSI PERENCANAAN DI LPM PPWH

Penilaian terhadap kebijakan ini dilakukan terkait dengan kebijakan dakwah yang dibuat pada kurun waktu tertentu. Kegiatan yang sifatnya baku karena kegiatan yang selalu dilakukan pada tiap tahun tertentu. Jadi peneliti tidak me;lihat secara kuantitatif aktifitas yang dilakukan akan tetapi melihat bagaimana kebijakan itu diterapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa proses perencanaan terdiri dari beberapa tahap sebgaimana tersebut dibawah ini :

1. Forecasting (perkiraan)

Mengestimasi dan memprediksi kondisi dan kejadian di masa datang serta kebutuhan dan peluang yang menyertainya. Seperti apa rupanya masa depan itu?

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang realistis, kritis dan individualis dalam kesehariannya. Hal itu terjadi karena masyarakat perkotaan sangat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Masyarakat perkotaan menghabiskan banyak makanan, pakaian, membangun rumah-rumah sebagai tempat berlindung, dan memperindah lingkungan mereka agar bisa berbangga satu sama lain. Dalam kondisi itu maka agama kurang menjadi perhatian utama bagi masyarakat perkotaan. Kebutuhan hidup yang

terus meningkat menjadikan mereka sangat sibuk dengan urusan ekonomi sehingga tanpa disadari mereka telah mengabaikan religiusitas dalam dirinya. Implementasi kebijakan dalam proses ini dilakukan oleh pihak lembaga dengan memperkirakan keadaan sekarang sekaligus dikaitkan dengan perkembangan masyarakat yang akan datang. Perkembangan pada saat ini mengalami perubahan yang sangat berbeda menyusul adanya musibah bangsa Indonesia dan seluruh dunia dalam menghadapi masa pandemi. Perubahan pola perilaku manusia yang berbeda dari tahun sebelumnya,sekaligus mempengaruhi pola dan bentuk dakwah yang dilakukan.

2. ***Establishing objective*** **(penetapan tujuan)**

Memperhitungkan hasil-hasil yang akan dicapai. Hasil- hasil apakah yang ingin LPM PPWH peroleh?

Berdirinya suatu Lembaga Pengabdian pada Masyarakat sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta itu sendiri. Jalinan antara pondok dengan masyarakat inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya lembaga ini. Adapun awal tujuan didirikannya Lembaga Pengabdian pada Masyarakat adalah :

a. Untuk mengorganisir aktivitas dakwah yang bersifat keluar yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.

b. Sebagai wadah pengabdian dan wahana intelektualitas santri.

c. Berfungsi mengintegrasikan Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dengan masyarakat.

d. Membantu pelaksanaan program-program Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dalam bidang pembinaan masyarakat.

Berawal dari pemikiran itulah, kita dapat berfikir bahwa keberadaan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta sangatlah penting. Karena selain dapat digunakan sebagai wadah para santri untuk mengamalkan ilmu dan sarana pembelajaran menghadapi masyarakat. Dapat juga berfungsi untuk memecahkan problem sosial keagamaan yang sedang berkembang di masyarakat.

3. *Programming* (pemrograman)

Yaitu aktivitas yang dilakukan dengan maksud menetapkan langkah-langkah mencapai tujuan, unit dan anggota yang bertanggung jawab serta urutan pengaturan waktu setiap langkah.[43]

KALENDER PROGRAM KERJA

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

[43] Terry, George.R. 2006. Prinsip-prinsip Manajemen. Penerjemah Smith. Jakarta: PT Bumi Aksara

YAYASAN PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA		
NO	**ROGRAM KERJA**	**Pelaksanaan kegiatan**
1.	**Pengurus Harian**	
	Pengadaan seragam pengurus	Sekali dalam kepengurusan
	Safari pengurus dan santri kewilayah	Kondisional
	Study Banding	Sekali dalam kepengurusan
	Buka puasa bersama	Setiap ramadhan
	Mengadakan musyawarah/rapat pengurus	Bulanan
	Membentuk Koordinator Wilayah	Persemester
	Pengadaan Kesekertariatan	Sekali dalam kepengurusan
	Mengklasifikasikan arsip LPM berdasarkan bentuk kegiatan.	Kondisional
	Pembuatan Kotak saran	Sekali dalam kepengurusan
	Menyusun laporan keuangan	Perbulan
	Koordinasi dengan pengurus asrama	Bulanan
2.	**Departemen Intelaktual**	

	1) Program Kerja Tahunan	
	Takbir Keliling	Malam Hari Raya Idul Adha
	pengolahan hewan Qurban	hari raya idul Adha-hari tasyrekh
	SILASTRA	Liburan Sekolah
	Anjangsana Santri TPA	Bulan Ramadhan
	Lomba dalam rangka Peringatan 17 Agustus 1945	Tanggal 17 Agustus
	Bedah buku	Persemester
	Lomba dalam peringatan hari ibu	Bulan Desember
	2) Program Kerja Dua Tahunan	
	Bakti Sosial	Sekali dalam kepengurusan
3.	**Departemen Pendidikan**	
	Pemantapan TPA	Persemester
	Pelaksanaan Madrasah Diniyyah	Bulan Juni
	Koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain baik internal maupun	Kondisional

	eksternal	
	Bimbel	
	Pendataan tutor bimbel	Sekali
	Piagam penghargaan Ustadz/ah Teladan	Setahun sekali
	training ustadz-ah TPA	Setahun sekali
	Musyawaroh dengan Koordinator TPA	Perbulan
	Out bond koordintor TPA dan pengurus	Setahun sekali
	Nonton Film anak	Tiga bulan sekali
4.	**Departemen Keagamaan Masyarakat**	
	Memenuhi segala bentuk permohonan kegiatan keagamaan di masyarakat	Kondisional
	Menjalin kerja sama sesama departemen dalam lembaga LPM ataupun dengan lembaga lain.	Kondisional

	Memenuhi permohonan khotib dan penceramah keagamaan	Kondisional
	Rapat Koordinasi Bulanan	Dua bulan sekali minggu 1&2
	Menyiapkan penceramah pengajian	Menurut jadwal yang ada
	Menyiapkan khotib jum'at	Setiap hari jum'at
	Pembuatan jadwal penceramah pengajian & khotib	Kondisional
	Pengajian ibu-ibu/Bpk-bpk/ remaja putra putri	Kondisional
	Pengarsipan teks khutbah	
	Pelatihan da'i dan da'iyyah	Setiap tahun
	Pelatihan Perawatan Jenazah (memandikan & mengkafankan jenazah)	1 sampai 2 kali setahun
	Ziarah Auliya'	Setiap tahun
	Milad BU	2 tahun sekali
	Pembuatan jadwal imsakiyaah Ramadhan	Setiap Bulan Ramadhan

	Pengajian Tri Wulan	3 Bulan Sekali
5.	**Departemen Humas**	
	Sirkulasi undangan keluar & masuk	Kondisional
	Pelayanan pengadaan transportasi untuk kegiatan LPM	Kondisional
	Pembuatan profile wilayah	Sekali dalam kepengurusan
	Publikasi LPM ke luar	Bulanan

10. *Scheduling* (penjadwalan)

Merupakan penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan

KALENDER PROGRAM KERJA **LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT** **YAYASAN PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA**			
No.	**Bentuk Kegiatan**	**Target Kegiatan**	**Ket**

1.	Mengklasifikasikan arsip LPM berdasarkan bentuk kegiatan	Memudahkan pencarian data	
2.	. Pembuatan Profil dan Peta Wilayah dengan Departemen Humas	Identifikasi karakteristik tiap-tiap daerah	
3.	Pembuatan Jadwal Keagamaan bersama Departemen Keagamaan (DKM)	Terjadwalnya kegiatan Khotib dan berbagai kegiatan keagamaan di daerah	
4.	Pembuatan seragam pengurus	Media untuk mempererat antar pengurus serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga	

5	Pengadaan Kotak Saran LPM	Tercapainya hubungan yang sinergis antara pengurus LPM dengan seluruh santri Wahid Hasyim	
6	Menyusun laporan keuangan setiap kegiatan LPM	Transparansi laporan peredaran keuangan di LPM	
7	Menyiapkan dana khusus untuk pembelian perlengkapan dan peralatan bendahara	Tercapainya kerja bendahara secara optimal	
8	Menyusun laporan keuangan untuk diajukan pada bendahara yayasan	Terciptanya sirkulasi keuangan LPM yang sehat dan transparan	
9	Arisan Bahjatul Ummahat	Menjalin silaturrahim dengan jamaah pengajian Bahjatul Ummahat	

10	SILASTRA	Menjalin kerukunan antar orang tua,dan santri. Salah satu wujud kepedulian dan perlayanan terhadap masyarakat Memberikan motivasi kepada masyarakat umum pentingnya pendidikan agama, kepedulian sesama dan kepedulian terhadap lingkungan bagi anak	
11	Anjangsana (Santri TPA wilayah)	Menyambut bulan suci Ramadhan Menjalin kerukunan antara santri Wahid Hasyim dengan santri TPA yang didampingi ustadz Wahid Hasyim Menumbuhkan kreatifitas dan kepedulian anak khususnya bidang keagamaan	

		Sebagai wujud kepedulian terhadap hubungan antar TPA desa dampingan	
12	Semarak Idul Adha (Santri TPA wilayah)	Menyambut hari raya Idul Adha Menjalin kerukunan antara santri Wahid Hasyim dengan santri TPA	
13	Training ustadz-ustadzahTPA	Bekal mengajr tpa Pengenalan wilayah tpa binaan	
14	Pembuatan Bimbel	Sebagai penampung kreatifitas santri dalam mengamalkan ilmu yang mereka miliki	
15	Pembuatan absensi ustadz-ustadah TPA	Sebagai media pengawasan pengurus terhadap Ustadz-Ustadah TPA	
16	Pembuatan buku	Bekal persiapan sebelum	

	panduan ustadz-ustadzah	pengajar di TPA	
17	Koordinasi koordinator TPA perbulan	Mengagali informasi dari setiap wilayah yang berhubungan dengan tpa serta sarana untuk sarring bareng dan silaturrahmi	
18	Penyaluran hewan qurban	Menumbuhkan sikap peduli antar sesama, khususnya bagi golongan yang mampu terhadap golongan yang tidak mampu. Serta membiasakan sedini mungkin jiwa-jiwa memberi	
19	Pembuatan jadwal ustadz ustadzah TPA	Ektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar di TPA	
20	TPAUMUM	Ajang silaturahmi anak-anak TPA dan ustad-dah	

21	Memenuhi segala bentuk permohonan kegiatan keagamaan masyarakat	Memberikan respon positive dengan masyarakat Tetap terjalin silahturokhim dengan masyarakat Menumbuhkan hubungan yang saling membutuhkan.	
22	Menjalin kerja sama sesama departemen dalam lembaga LPM ataupun dengan lembaga lain.	Koordinasi dan konsolidasi antar pengurus lembaga. Wujud konsistensi sesama pengurus. Program kerja LPM PPWH.	
23	Memenuhi permohonan khotib dan penceramah keagamaan	Wujud pengabdian dengan masyarakat Mengembangkan kemampuan para ustadz Sebagai syiar agama islam	
	Membuat jadwal khotib jum'at,	Terpenuhinya permohonan masyarakat pada pada point	

24	ceramah keagamaan serta pengajian per wilayah asuhan.	3. Terorganisirnya para ustadz dalam kerjanya.	
25	Mengikuti perkembangan pengajian ibu-ibu Bahjatul Ummahat	Melestarikan hubungan dengan ibu-ibu Bahjatul Ummahat Pengembangan sikap santri dengan masyarakat Koordinasi dengan pengurus pengajian Bahjatul Ummahat	
26	Memenuhi permohonan khotib dan ceramah keagamaan dalam bulan romadlon	Wujud pengabdian dengan masyarakat pada bulan romadlon.Mengembangkan kemampuan para ustadz Sebagai syiar agama islam	
27	Membuat jadwal khotib jum'at, ceramah keagamaan serta pengajian per	Terpenuhinya permohonan	

	wilayah dalam bulan romadlon.	masyarakat pada point 3. Terorganisirnya para ustadz dalam kerjanya.	
28	Ziarah Auliya	Syiar kepada masyarakat umum serta dapat memumbuhkan sifat keagaamaan jamaah	
29	Training Pelatihan Jenazah	Sebagai sarana pembekalan bagi ibu-ibu yang menjadi petugas dalam merawat jenazah (Moddin) di wilayah masing-masing agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai tuntunan agama serta kaderisasi pengurusan jenazah yang ada di wilayah.	
30	Pembuatan jadwal Imsakiyah	Sebagai panduan dalam menentukan waktu di bulan ramadan	

31	Pelatihan da'i dan da'iyyah	Sebagai bekal bagi seorang penda'i sebelum mereka terjun kemasyarakat	
32	Piagam penghargaan Ustadz/ah Teladan	Sebagi bentuk apresiasi pengurus terhadap ustdz-ah TPA, serta sebagai motivasi santri untuk terus berbagi.	
33	Milad BU	Menanamkan nilai-nilai agama sebagai pondasi dan pegangan hidup setiap wanita muslimat dalam membangun rumah tangga. Melestarikan budaya yang baik dan bermanfaat sebagai media syiar	
34	Nonton bareng	Menambah dan menanamkan nilai-nilai ajaran agama melalui pemutaran film, serta menumbuhkan sikap peka dan kritis.	
35	Out bond	Untuk mempererat	

	koordintor TPA dan pengurus	komunikasi antara koordintar TPA dengan pengurus	
36	Buka puasa bersama koordintor TPA dan pengurus	Untuk mempererat komunikasi antara koordintar TPA dengan pengurus	

11. *Budgeting* (penganggaran)

Yaitu aktivitas membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk kegiatan dan waktu tertentu

KALENDER PROGRAM KERJA			
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT			
YAYASAN PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA			
NO	**PROGRAM KERJA**	**Pelaksanaan kegiatan**	**Anggaran**
1.	**Pengurus Harian**		
	Pengadaan seragam pengurus	Sekali dalam kepengurusan	
	Safari pengurus dan santri kewilayah	Kondisional	
	Study Banding	Sekali dalam kepengurusan	

	Buka puasa bersama	Setiap ramadhan	
	Mengadakan musyawarah/rapat pengurus	Bulanan	
	Membentuk Koordinator Wilayah	Persemester	
	Pengadaan Kesekertariatan	Sekali dalam kepengurusan	
	Mengklasifikasikan arsip LPM 2010-2013 berdasarkan bentuk kegiatan.	Kondisional	
	Pembuatan Kotak saran	Sekali dalam kepengurusan	
	Menyusun laporan keuangan	Perbulan	
	Koordinasi dengan pengurus asrama	Bulanan	
2.	**Departemen Intelaktual**		
	1) Program Kerja Tahunan		
	Takbir dalam masjid dan terbatas	Malam Hari Raya Idul Adha	
	pengolahan hewan Qurban	hari raya idul Adha-hari tasyrekh	
	SILASTRA	Liburan Sekolah	
	Anjangsana Santri TPA	Bulan Ramadhan	

	Lomba dalam rangka Peringatan 17 Agustus 1945	Tidak terlaksana dikarenakan pandemi	
	Bedah buku		
	Lomba dalam peringatan hari ibu	Bulan Desember	
	2) Program Kerja Dua Tahunan		
3.	**Departemen Pendidikan**		
	Pemantapan TPA	Persemester	
	Pelaksanaan Madrasah Diniyyah	Bulan Juni	
	Koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain baik internal maupun eksternal	Kondisional	
	Bimbel		
	Pendataan tutor bimbel	Sekali	
	Piagam penghargaan Ustadz/ah Teladan	Setahun sekali	
	training ustadz-ah TPA	Setahun sekali	
	Musyawaroh dengan Koordinator TPA	Perbulan	

	Out bond koordintor TPA dan pengurus	Setahun sekali	
	Nonton Film anak	Tiga bulan sekali	
4.	**Departemen Keagamaan Masyarakat**		
	Memenuhi segala bentuk permohonan kegiatan keagamaan di masyarakat	Kondisional	

12. *Developing procedure* (pengembangan prosedur)

Yaitu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan

Dalam masa kepengurusan yang telah berjalan, banyak program yang telah dilaksanakan. Baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Program-program tersebut ada yang bisa dikatakan sukses dan ada yang mengalami kendala. Seperti yang telah diketahui bahwa di dalam LPM ada 4, yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Keagamaan Masyarakat, Departemen Intelektual, dan Departemen Humas. Oleh karena itu, berbagai program pun banyak diselaraskan dengan kebutuhan departemen-departemen tersebut antara lain, yaitu:

a. Training Ustadz-ustadzah

Acara tersebut sangat urgen karena tujuan utama diadakan acara tersebut adalah selain sebagai bekal mengajar di masing-masing wilayah TPA, dapat juga bermanfaat sebagai media pengenalan wilayah

TPA di daerah LPM Wahid Hasyim. Dalam kegiatan ini akan di datangkan *trainer-trainer* handal di bidang pengelolaan TPA dan pembelajaran terhadap anak-anak sehingga menjadikan ustadz-ustadzah yang handal dan siap menghadapi dan mengajarkan ilmu ke anak didiknya.

b. Ziarah Auliya'

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wisata rohani bagi masyarakat. Yang nantinya dapat bermanfaat dikemudian hari. Adapun tujuan yang telah diagendakan meliputi. Tahun 2011 Ziarah di Sunan Gunung Jati Cirebon, Zirah Habib Husain Bin Umar Al Idrus Kwitang Jkt, sowan ke KH. Zainuddin MZ Jkrt, Kubah Mas, Ziarah Habib di Kendal, Masjid Istiqlal. Tahun 2011 Sowan KH. Dimyati Rois (Mbah Dim). Kendal Raden Fatah. Kudus, Sunan Kalijaga. Demak, Sunan Kudus. Kudus, Ziarah KH. Mutammakin. Pati, Ziarah KH. Abdullah Salam. Pati. Sedangkan untuk tahun berikutnya tujuan Ziarah Jombang,Sunan Ampel Surabaya, Bangkalan Madura, Bung Karno Blitar serta bersilaturrahmi dengan alumni Wahid Hasyim yang ada di Blitar.

c. Silaturahmi Antar Santri TPA (SILASTRA)

Silaturahmi antar santri TPA dalam satu binaan LPM PPWH. Dalam acara ini semua santri TPA dalam binaan LPM PPWH dikumpulkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lomba hiburan yang edukatif Adapun lomba yang diadakan meliputi: Out bound, sepeda

hias, mewarnai, sholawat dan menanam pohon. Setelah itu didakan bersih-bersih sungai. Adapun tujuan kegiatan ini adalah menjalin silaturahmi antar santri TPA. Akan tetapi kegiatan yang menjadi rutinitas ini pada tahun ini tidak berjalan dikarenakan pandemi covid 19.

d. Milad Bahjatul Ummahat

Dalam kegiatan Milad Bahjatul Ummahat akan di kumpulkan pengajian ibu-ibu dalam satu koordinasi LPM PPWH, bertempat di daerah yang telah ditentukan secara bergiliran. Dalam kegiatan ini akan diadakan beberapa macam perlombaan. Adapun peserta yng mengikuti kegiatan tersebut 23 dan 24 grup. Sedngkan lomba yng diadakan meliputi Festival Shalawat Se-Kabupaten Sleman, Lomba Mars Bahjatul Ummahat, Adminitrsi pengajian, Lomba Amaliyyah Yaumiyyah Dan Santunan Anak Yatim. Kegiatan ini ditunda sampai kondisi benar-benar normal seperti sedia kala.

e. Semarak Idul Adha

Pada kesempatan peringatan Idul Adha tahun depan LPM Wahid Hasyim akan mencoba melakukan berbagai perubahan. Antara lain pada penyelenggaraan berikutnya LPM bekerjasama dengan pihak Kelurahan Condongcatur melalui motornya yaitu Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Condongcatur.

13. ***Estambling and interpreting police*** (penetapan dan interpretasi kebijakan)

Yaitu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi pekerjaan manajer dan bawahannya.[44]

Kepengurusan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat periode 2019-2020 dalam rangka mengemban amanah pengabdian pada masyarakat, diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pondok Pesaantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Kepengurusan ini merupakan perwakilan santri putra dan putri dari warga yang ada di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.

Di bawah arahan dan bimbingan dari pengasuh dan para senior yang telah banyak mengetahui seluk beluk dan kiprah Lembaga Pengabdian pada Masyarakat selama berdirinya, kepengurusan ini dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih secara langsung oleh pengurus Yayasan . Dalam menjalankan roda organisasi, ketua dibantu oleh seorang bendahara, dua orang sekretaris dan beberapa departemen (Departemen Pendidikan dan Intelektual, Departemen Keagamaan Masyarakat, Departemen Humas dan Tim Monitoring). Struktur organisasi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat selengkapnya adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PENGURUS LPM

[44]Siswanto.2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara

Pelindung **:** Bupati Sleman

Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim

Pembina **:** K. Sunhaji S.Ag

Ketua : Nur Alwi

Sekretaris I : Irwan Ahmad Akbar

Sekretaris II : Ayyu Ainin Mustafidah

Bendahara **:** Muhajir Arief

1. **BIDANG PENDIDIKAN Ibnu Rosidi (Kepala Bidang)**

   a. **Bidang Penjadwalan**

      - Ahmad Syarif Sirojuddin
      - Insiatun Niswah
      - Zaen Irma
      - Aini Silvi Arofah

   b. **Bidang Bimbingan Belajar**

      - Nurul Hidayah
      - Desi Ragil M
      - Taqiyah Nur Fauziah

   c. **Bidang Kurikulum**

      - Ryan Sofatul Anam
      - M. Zahrul Fikri

- Dewi Ulya

2. **BIDANG KEAGAMAAN MASYARAKAT Ahmad Faruq (Kepala Bidang)**

   a. **Bidang Pengajian**

      - Aziz Fauzi
      - M. Wahid Syafiuddin

   b. **Bidang Khutbah Jum'at**

      - Adib Aufal Marom
      - Ichwan Ali
      - Purnomo

   c. **Bidang Bahjatul Ummahat**

      - Nafisatul Mustaghsanah
      - Atica Fatmawati
      - Rofi' Rodiyah
      - Pratiyas Hida Ilyana
      - Eka Purnama Sari

3. **BIDANG INTELEKTUAL** Charis Fuadi (Kepala Bidang)

   - Zahrina Fani A Habib Nasruhin
   - Agung Heri Setiadi
   - Zeni Mey Puspita
   - Zida Malikha
   - Annisatul Azizah

4. **Tim monitoring**

- Lukman hakim
- Asyia Lu'lu ul Husna
- Siti Suryani
- Khusnatul Aini

Dalam perjalanannya Lembaga Pengabdian pada Masyarakat ini mengalami pergantian struktur dan formasi kepengurusan (Resuffle) berdasarkan Surat Keputusan sebagai upaya untuk mencapai kesinambungan program dan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi menuju kondisi lembaga yang kondusif serta profesional dalam pengelolaannya. Salah satunya dengan pergantian posisi sekretaris I dan pemerataan pembagian kerja sesuai dengan kompetensi ke dalam empat depatemen, yaitu:

1. Departemen Pendidikan

Berkonsentrasi dalam kegiatan-kegiatan TPA dan hal-hal yang berkaitan dengan TPA. Sebagai fasilitator kegiatan TPA dan pengembangan TPA yang yang ada di wilayah Condongcatur dan sekitarnya. Mulai dari pembuatan jadwal mengajar, kurikulum, silabus sampai pada pusat data dan informasi yang berhubungan dengan TPA.

2. Departemen Intelektual

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat yang bersifat rutin tahunan maupun kegiatan-kegiatan

yang bersifat insidental serta kegiatan-kegitan lain yang membawa kemajuan bagi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.

3. Departemen Keagamaan Masyarakat

Wilayah kerjanya meliputi pengiriman dai/ penceramah dalam berbagai kegitan keagamaan seperti: pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, pengajian dalam rangka peringatan hari besar Islam, kultum dan ceramah Ramadhan, pengajian pemuda, aqiqohan, muqoddaman, tahlilan, tasyakuran, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan dakwah Islamiyah.

4. Departemen Humas

Mengatur program dan mekanisme kerja dalam rangka menyalurkan informasi dan menjalin kerja kolektif, koordinatif dan harmonisasi antar pengurus, santri serta Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dengan Masyarakat umum.

Adapun Struktur organisasi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat setelah reshuffle selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pelindung	Bupati Sleman Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim
Pembina	**:** K. Sunhaji S.Ag
Ketua	: Nur Alwi
Sekretaris I	**:** Adib Aufal Marom

Sekretaris II : Ayyu Ainin Mustafidah

Bendahara : Muhajir Arief

1. **BIDANG PENDIDIKAN Ibnu Rosidi (Kepala Bidang)**

   a. **Bidang Penjadwalan**

      - Ahmad Syarif Sirojuddin
      - Insiatun Niswah*
      - Zaen Irma *
      - Aini Silvi Arofah*

   b. **Bidang Bimbingan Belajar**

      - Nurul Hidayah
      - Desi Ragil M
      - Taqiyah Nur Fauziah

   c. **Bidang Kurikulum**

      - Ryan Sofatul Anam
      - M. Zahrul Fikri*
      - Dewi Ulya*

2. **BIDANG KEAGAMAAN MASYARAKAT Ahmad Faruq (Kepala Bidang)**

   a. **Bidang Pengajian**

      - Aziz Fauzi*
      - M. Wahid Syafiuddin*

   b. **Bidang Khutbah Jum'at**

- Adib Aufal Marom
- Ichwan Ali
- Purnomo*

c. **Bidang Bahjatul Ummahat**

- Nafisatul Mustaghsanah*
- Atica Fatmawati *
- Rofi' Rodiyah*
- Pratiyas Hida Ilyana
- Eka Purnama Sari*

3. **BIDANG INTELEKTUAL** Charis Fuadi (Kepala Bidang)

- Zahrina Fani A *
- Habib Nasruhin
- Agung Heri Setiadi*
- Zeni Mey Puspita*
- Zida Malikha *
- Annisatul Azizah

4. **Tim monitoring**

- Lukman hakim
- Asyia Lu'lu ul Husna *
- Siti Suryani*
- Khusnatul Aini *

*) mengundurkan diri sebelum berakhirnya kepengurusan karena boyong dari pesantren.

Beberapa catatan:

1. Pada saat ini dengan pengurus yang berjumlah 35 akan tetapi dengan berbagai persoalan yang melanda personal pengurus baik yang mengundurkan diri karena boyong maupun yang lainya, sehingga jumlah pengurus dari 35 tinggal 15 orang, sehingg mau tidak mau pengurus merekrut santri yang memiliki didikasih yang tinggi terhadap pondok untuk kita rangkul di kepengurusan tanpa menggunakan Surat Keputusan dari Yayasan agar dapat membantu program kerja yang ada . Lembaga Pengabdian pada Masyarakat memiliki kurang lebih 100 ustadz ustadzah yang tersebar di TPA-TPA wilayah Condongcatur dan sekitarnya, adapun rinciannya wilayah *terlampir*, serta dai/ penceramah yang berjumlah 29 orang yang diterjunkan di wilayah Kecamatan Depok dan sekitarnya.
2. Dalam rangka penyamaaan visi dan misi organisasi agar kembali memiliki sudut pandang yang sama karena adanya tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari sumber yang bersifat internal atau eksternal kepengurusan ini melakukan rapat koordinasi yang tidak terjadwal (incidental), sesuai dengan kebutuhan.

Rincian

No	TPA	Nama	Asrama
1	Al-Istiqomah Kaliwaru	Turnomo	Abdur Rosyid
		Laila Nur Aflah	Al Hidayah
2	Prayan Raya, Prayan Kulon	Nurwanto	Al-Ghozali
		Latifah	Al-Hikmah
3	Al- Fatah Prayan Wetan	M.Dani Habibi	Ibnu Rusd
		Fatin Afifah	AHC
4	Nurul Hidayah Pulohdadi	Darkan Cahyani	Al-Ghozali
		Nur Jannah	Al-Hikmah
5	Ar-Rofi' Ngropoh	M.Yusuf I	Ibnu Rusd
		Anik Nur Azizah	AHC
6	Al- Muhlasin Pringgolayan	Achmad Saiful	Ibnu rusd
		Sofwatul Basiroh	An-Najah
7	Fathurrohman Cepit	MOH Royan Rois	Ibnu Rusd
		Dina Kurnia	An-Nur
8	As- Shobar Soropadan	RH Al-Hadid	Al-Ghozali
		Masriyah	Al Hidayah
9	Ar- Rohmah Widoro	Muhammad Fathurroziqin	Ibnu rusd
		Rizky Amalia	An-Nisa'

10	Masjid Jami' Gaten	Muhammad Fajar Is. T	Abdur Rosyid
		Arini Nur Hidayati	Halimah
11	Shirotul Jannah Papringan	Abdul Aziz	Abdur Rosyid
		Siti Ngazizah	Al-Hikmah
12	Al- Hidayah Gorongan	Mohammad Toha Yahya	Abdur Rosyid
		Rini Susanti	An-Najah
13	Al-Huda Papringan	M. Abdul Aziz	Al-Ghozali
		Royanah	AHC
14	Az Zahro Gaten	M. Mansyur	Syafii
15	Babus Salam Widoro baru	Milatun Nuril A'yuni	AHC
16	Al- Fath Seturan	Irmey Uli Rohmaniyah	AHC

Kebijakan-kebijakan yang berupa program kegiatan tersebut terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama yang sinergi antara pihak yang membuat kebijakan dalam hal ini pengelola pondok pesantren atau LPM dengan para pelaksana kegiatan. Ditunjang dengan adanya komunikasi, sumber-sumber lembaga diantaranya staf yang emadai, wewenang dan prasarana atau fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan lembaga. Selain hal tersebut juga adanya perilaku-perilaku para pengurus Lembaga yang konsekuensi penting dalam implementasi kebiajakan lembaga. Adanya struktur birokasi yang aktif mendukung terlaksananya program kebijakan lembaga LPM.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Secara garis besar implementasi kebijakan yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan di LPM PPWH sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan permasalahan dakwah.

Terdapat pengaruh yang baik terkait dengan perkembangan manajemen pondok pesantren, dapat dilihat dari berbagai kemajuan masyarakat diantaranya:

1. Jaringan

   Dalam perjalanan kepengurusan periode ini pengurus mencoba untuk memperluas jaringan (relasi) dalam pelaksanaan program diberbagai bidang. Langkah yang ditempuh ialah dengan menjalin kembali hubungan dengan beberapa wilayah maupun instansi terkait maupun tidak yang sebelumnya sempat renggang dikarenakan berbagai factor. Beberapa langkah yang dilakukan;

   a. Mengadakan kegiatan lomba takbir keliling se-kelurahan Condongcatur bekerjasama dengan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Condongcatur Tengah.
   b. Menjalin hubungan dengan instansi pendidikan dibeberapa sekolahan di Kecamatan Depok dalam bidang pengajaran keagamaan.

2. Kondisi Masyarakat

Kiprah LPM ditengah masyarakat menyentuh di berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja dan orang tua. Hal ini sudah terjalin jauh sebelum Lembaga ini diformalkan. Artinya ruh perjuangan untuk memajukan masyarakat sudah ada semenjak dahulu. Dalam kepengurusan periode ini ada beberapa bentuk kegiatan yang merupakan program estafet dari kepengurusan sebelumnya.

Kondisi masyarakat berdasarkan pantauan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan informasi tokoh masyarakat sekitar yaitu:

a. Kegiatan keagamaan

1) Taman Pendidikan Al-qur'an

Pengurus sepertinya masih harus terus mencari tentang cara dan *Ghirah* santri agar mua berbagi pengetahuan agama ke anak-anak TPA yang ada di wilayah. Karena jadwal mengajar TPA pun selalu disesuaikan dengan jadwal kuliah. Selain itu juga dirasakan kurangnya dorongan dan antusiasme orang tua. Selain itu lingkungan yang bergerak mengikuti zaman yang amat cepat juga tidak bisa dipersalahkan. Ada baiknya selalu berusaha memperbaiki diri tanpa lelah dan selalu berprasangka baik. Hal ini dapat di kembangkan mulai dari sebuah kesadaran diri dan dorongan untuk dapat bermanfaat bagi sesama. *Khoirun nas Anfa uhum lin nas*

2) Remaja

Majlis ini sebenarnya sangat urgen dalam regenerasi tiap daerah. Tapi kadang-kadang sering dipertanyakan masihkah majlis ini hidup? Yang kami perhatikan satu-satunya wadah kegiatan keagamaan untuk usia remaja (SMP-SMA-Pra nikah) ini memudar. Akhirnya mereka mencari kesibukan diluar sana yang kering akan siraman rohani. Sebenarnya LPM PPWH dapat masuk sedikit demi sedikit ke wilayah mereka. Antara lain haruslah berani dan mau mengikuti kegiatan kepemudaan secara umum. Selain itu setiap ada acara dari pondok sebisa mungkin mereka di libatkan dan harus ada wadah untuk mereka berkreatifitas.

3) Peran serta Orang tua

Hubungan Pondok khususnya LPM dengan masyarakat masih terjalin baik. Terlepas dari itu terjadi pergeseran nilai-nilai keagamaan ditengah masyarakat. Semangat dan minat terhadap kegiatan agama sedikit demi sedikit mengalami kemerosotan hal ini apabila diprosentasi secara umum. Kegiatan pengajian baik itu Bapak-bapak atau Ibu-ibu masih berjalan meski yang bapak-bapak kadang-kadang kurang konsisten. Membangunkan minat dan kesadaran diri memang membutuhkan cara yang cerdas serta proses istiqomah. Namun perkembangan dan semangat juang positif yang mereka perlihatkan pun tidak dapat dipungkiri sangat menyejukkan hati.

2. Saran

1. Pihak lembaga perlu meneliti sehingga mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor yang ada yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.
2. Perlu diselenggarakan program pelatihan penyusunan perencanaan organisasi kepada para pengelola LPM PPWH.
3. Kebijakan yang direkomendasikan terkait dengan perencanaan yang hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi SDM yang ada.
4. Perlu adanya evaluasi kebijakan terhadap implementsi perencanaan sebelumnya, sehingga apabila terdapat program yang belum terlaksana bisa ditindak lanjuti sebagai rekomendasi dalam menyusun kebijakan yang akan datang.
5. Pimpinan lembaga lebih meningkatkan tali silaturrahim dengan masyarakaat setempat.
6. Selalu berkonsultasi kepada para “sesepuh” dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penilitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Yogyakarta: IFFA Press, 1998

AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Knsep, Teori dan Aplikasi*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta , Cetakan ke V, th. 2013

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep ImplementasiKebijakan : Perspektif , Model dan kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca Vol 1 Agustus 2008 Univesitas Pepabari Makassar

Badri, Munawiroh."*Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah*", Jakarta : Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI, 2007

Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *"Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembanganya",* Jakarta : Departemen Agama, 2003

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, bandung, Alfabeta, th. Cet ke 7, th. 2014

_____, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Penerbit Alfabeta , Bandung, th 2013

F. Delmar dan S. Shane, "Does Business Planning Facilitate the Development of New Ventures" *Strategic Management Journal*, December 2003

Ibnu Rosidi, " *Pengembangan SDM Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Lembaga Pengabdian Pda Masyarakat (LPM) Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta"*, Skripsi Sarjana Strata I Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Jurnal Ekonomi dan Manajemen Program SI Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeeri Makassar, Volume 1 No. 1 th 2010

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Bandung : Bumi Aksara, 2009

MU YAPPI,"*Manajemen pengembangan pondok pesantren"*, Jakarta: Media Nusantara, 2008

Muhammad Maskur, *"Pengembangan Model Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren dalam peningkatan kualitas SDM di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Muhdlor desa Darunagan, Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur",* Skripsi Sarjana Strata 1 Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012

Muhtarom, Zaini. *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*,Yogyakarta: PT. al- Amin Press, 1996

Mujamil Qomar, *"Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Istuti"*, Jakarta : Erlangga

Profil dan dokumen LPM PPWH pada hari minggu 10 Mei 2014

Rohadi, dkk, Rekonstruksi Pesantren Masa Depan , Jakarta: PT. Listarafiska Putra, 2008

Sahrizal Fahlawi, S.Pd.I, "*Kontribusi Kompetensi Guru Pondok Pesantren Wahid Hasyim Dalam Pembentukan Religiusitas Masyarakat Daerah Binaan Desa Condong Catur Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"*, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Sri Wiludjeng. *Pengantar Manajemen* , Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2007

Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003

T. Hani Handoko. *Manajemen* , Yogyakarta: BPFE, 1984

Terry, George.R, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Penerjemah Smith. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

Usman, Husaini,Manajemen"Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001

Usman. *Manajemen* , Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

Wahjoetomo, "*Perguruan Tinggi Pesantren"*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Wahab, Solichin A, (1991) Analisis Kebijakan dariFormulasi ke Implementasi Kebijakan Bumi, Aksara Jakarta.

Winarno, Budi. 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta

Wibawa Samodra, Kebijakan Publik, Intermedia , Jakarta th. 1994

Winarno Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, th. 2002